

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Strategi visual politik Yves Saint Laurent tidak hanya menjadi respon estetika terhadap konstruksi gender tradisional dalam industri fashion internasional, tetapi juga merupakan bentuk perlawanan simbolik yang mendalam terhadap sistem representasi patriarkal yang telah mengakar secara historis. Pendekatan visual YSL terutama dalam koleksi *Le Smoking* (1966) dan *Scandal* (1971) menggunakan elemen-elemen androgini, performatif, dan dekonstruktif untuk mendestabilisasi batas-batas maskulinitas dan feminitas yang bersifat hegemonik. Melalui perspektif *postmodern*, khususnya gagasan performativitas gender oleh Judith Butler dan konsep *the Politics of the Visual* oleh Christina Rowley, dapat dipahami bahwa representasi bukan sekadar cerminan identitas, melainkan ruang produksi makna yang diperebutkan secara politis. YSL memanfaatkan *fashion* sebagai medium artikulasi identitas gender yang cair, menolak esensialisme gender, dan membuka diskursus alternatif atas tubuh perempuan dalam ruang publik. *Fashion* dalam konteks ini tidak netral, melainkan medan wacana dan kontestasi di mana simbol, tubuh, dan estetika digunakan untuk menegosiasikan kekuasaan. Dengan demikian, pendekatan visual politik Yves Saint Laurent tidak hanya mengganggu norma gender arus utama, tetapi juga memberikan kontribusi konkret dalam pembentukan norma internasional yang lebih inklusif, setara, dan transformatif, serta memperkuat posisi *fashion* sebagai praktik budaya yang mampu mereproduksi maupun menggugat struktur sosial secara global.

#### **5.2. Saran**

Berangkat dari temuan tersebut, penting bagi industri *fashion*, institusi pendidikan, dan aktor hubungan internasional untuk mengadopsi pendekatan yang lebih kritis terhadap visualitas dan representasi gender. Industri *fashion* tidak bisa lagi hanya menjadi reproduktor estetika, tetapi harus bertransformasi

menjadi ruang kultural-politik yang sadar akan tanggung jawab sosialnya. Rumah mode dan desainer perlu melampaui slogan feminis permukaan dengan mengimplementasikan keberpihakan terhadap kesetaraan gender secara struktural baik dalam pemilihan model, narasi kampanye, maupun distribusi kuasa dalam rantai produksi. Sementara itu, negara-negara yang menggunakan *fashion* sebagai bagian dari diplomasi publiknya, seperti Prancis, perlu menyadari potensi strategis dari *visual politics* sebagai alat untuk mempengaruhi norma internasional yang progresif. Penelitian ini juga mendorong adanya integrasi antara teori kritis dalam hubungan internasional dengan studi budaya visual agar kajian akademik lebih mampu membaca *fashion* sebagai alat *soft power* yang sarat makna politik. Akhirnya, perlu kesadaran kolektif bahwa pemberdayaan gender dalam industri *fashion* tidak cukup hanya melalui simbol, tetapi menuntut perubahan struktural yang mengganggu dominasi patriarkal dan menciptakan sistem representasi yang lebih adil dan egaliter.